

Bulan :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

2	0	2	2
---	---	---	---



SUBBAGIAN HUMAS

Tanggal :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	

Media Online	
Media Cetak	Koran Jakarta

Pendapatan 13 Pajak Turun Menjadi Sorotan

Semua komisi DPRD DKI Jakarta diminta memprioritaskan program yang langsung bersentuhan dengan masyarakat.

JAKARTA - DPRD DKI Jakarta menyoroti rendahnya realisasi pendapatan 13 jenis pajak saat pembahasan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUPA-PPAS) APBD tahun 2022. Sorotan ini antara lain disampaikan Wakil Ketua Badan Anggaran DPRD DKI Jakarta, Khoirudin, Kamis (6/10).

Dia mengatakan rendahnya realisasi pendapatan harus ditanggapi serius dan wajib dialami saat pembahasan dokumen KUPA-PPAS tahun anggaran 2022. Pada bulan September, realisasi pendapatan 13 jenis pajak baru men-

capai 65,26 persen.

"Komisi C paling bertanggung jawab untuk memaksimalkan potensi pendapatan. Ini akan dibedah variabelnya yang membuat tidak maksimal capaian 13 pajak. Banyak yang di bawah target," ujar Khoirudin.

Lebih jauh, Khoirudin berharap Komisi Bidang Keuangan DPRD itu bisa menggenjot Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) DKI agar memaksimalkan pemungutan pajak daerah pada triwulan terakhir. Sebab pergeseran semua kegiatan ataupun program APBD Perubahan tahun ini sangat bergantung pada realisasi pajak daerah.

"Ini kunci pembangunan bisa dijalankan. Maka, pendapatan harus dimaksimalkan di bawah pengawasan Komisi C. Kami akan berkoordinasi dengan Komisi C untuk memaksimalkan pendapatan," ucapnya.

Selain itu, Khoirudin juga minta empat komisi lainnya untuk memprioritaskan program kegiatan yang langsung bersentuhan masyarakat. Hal

ini mengingat pendapatan Jakarta masih sangat rendah. "Saya berharap agar semua komisi memprioritaskan program yang langsung bersentuhan dengan masyarakat, sedangkan program yang tidak prioritas ditunda dulu, karena ada defisit. Pendapatan jauh dari target," kata Khoirudin.

« Pembahasan ini merupakan tindak lanjut surat Gubernur kepada Ketua DPRD. »

PRASETYO EDI MARSUDI
Ketua DPRD DKI Jakarta

Diakui

Sementara itu, Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta, Lusiana Herawati, mengakui memang masih ada sejumlah jenis pajak yang jauh dari target. Salah satu penyebabnya lantaran adanya penyesuaian tarif serta

kebijakan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) awal tahun lalu.

Untuk pajak air tanah memang rendah karena adanya penyesuaian tarif Nilai Perolehan Air Tanah (NPAT). Kemudian, untuk hotel, restoran, hiburan, penerangan jalan, dan parkir juga berpendapatan rendah karena tahun ini masih ada PPKM level 2 dan 3. "Berdasarkan data yang dihimpun dari 13 jenis pajak, ada delapan yang realisasinya di bawah 70 persen," tutur Lusiana.

Dia merinci pajak air tanah 13,3 miliar dari target 100 miliar. Pajak parkir 300 miliar dari 1,3 triliun. Pajak hiburan 276 miliar dari target 750 miliar. Kemudian, bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB) 4 triliun dari 7,5 triliun.

Sebelumnya, DPRD dan jajaran Pemprov DKI Jakarta akan mendalami kebijakan perubahan APBD tahun 2022 dalam pembahasan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUPA-PPAS) APBD

tahun anggaran 2022. Berdasarkan hasil rapat Badan Musyawarah (Bamus) DPRD DKI Jakarta, pembahasan KUPA-PPAS APBD tahun ini diawali rapat Badan Anggaran (Banggar) bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).

Ketua DPRD DKI Jakarta, Prasetyo Edi Marsudi, mengatakan bahwa berdasarkan jadwal, dokumen KUPA-PPAS APBD ditargetkan rampung menjadi Raperda Perubahan APBD 15 Oktober.

"Pembahasan ini merupakan tindak lanjut surat Gubernur kepada Ketua DPRD," ujar Prasetyo. Kemudian, Prasetyo menjelaskan bahwa Raperda Perubahan APBD tahun anggaran 2022 akan melalui tahapan rapat paripurna 18 Oktober.

Selanjutnya, hasil pembahasan komisi-komisi akan kembali dirumuskan dalam forum Banggar bersama TAPD. Kemudian, dilanjutkan penelitian akhir dan persetujuan Raperda Perubahan APBD.

■ Ant/jon/G-1